

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Tanpa Pengarang, Editor-----, Tahun, *Ajeg Bali Sebuah Cita – Cita*, Edisi Khusus HUT Ke-55, Penerbit, Bali Post, Denpasar.
- Ali. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Belinfante. A.D. dan Burhanoeddin Soetan Batuah, 1983, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit : Binacipta, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit : Fakultas Psikologi, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Kedelapan*, Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. Muchsin & Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Penerbit : alumni, Bandung.
- Huda. Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit : Nusa Media, Bandung.
- Kusumaatmadja. Mochtar, 1985, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Kodoatie. Robert J. & Roestam Sjarief, 2010, *Tata Ruang Air*, Penerbit : ANDI, Yogyakarta.
- Koeswahyono. Imam & Soimin (editor), 2012, *Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang Di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, Penerbit: UB Press, Malang.

- Marzuki. Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Peters. Jan Hendrik & Wisnu Wardana, 2013, *Tri Hita Karana, The Spirit of Bali*, Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Rajagukguk. Erman dan Ridwan Khairandy (ed), 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ridwan. H. Juniarso & Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit : Nuansa, Bandung.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit : UII-Press, Yogyakarta.
- Rijadi. Prasetijo, 2005, *Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan*, Penerbit : Airlangga University Press, Surabaya.
- Silalahi. M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit : PT. Alumni, Bandung.
- Sirtha. I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Penerbit : Udayana University Press, Bali.
- Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto. Soerjono 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemarwoto. Otto, 1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit : Djambatan, Bandung.
- Sugandhy. Aca, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono. Bambang, 2006, *Metode Penulisan Hukum*, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.

Surpha. I Wayan, 2012, *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*, Penerbit : Pustaka Bali Post, Denpasar.

Sutedja. Mertha 2012, *Tri Hita Karana And World Peace*, Penerbit : Paramita, Surabaya.

Thaib. Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Penerbit : Total Media, Yogyakarta.

Yusuf. Asep Warlan, 1997, *Pranata Pembangunan*, Penerbit : Universitas Parahyangan, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)

Peraturan Daerah Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatn Badung No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten badung Tahun 2014 Nomor 1).

C. JURNAL/ ARTIKEL/ SKRIPSI – TESIS

I Wayan Gede Suacana, “Praktik Demokrasi Di Desa Pakraman Bali Aga Dan Apanage”, Kertha Patrika - Jurnal Ilmiah FH UNUD, Vol. 34 No. 2, Agustus 2010.

I Made Arya Utama dan I Ketut Sudiarta, “Kajian Normatif Terhadap Efektifitas Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 Serta Strategi Implementasinya”, Disajikan dalam Seminar Nasional Membangun Bali Dalam Kerangka RTRWP Bali, diselenggarakan oleh Universitas Udayana, Denpasar, Tanggal 6 Mei 2011.

I Ketut Sudiarta, dkk, “Implementasi Perda RTRWP Bali No. 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung), Kertha Patrika - Jurnal Ilmiah FH UNUD, Vol. 37 No. 2, Januari 2012.

Ni Nyoman Sukeni, “Pelanggaran Terhadap Peraturan Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Pada Pembangunan Hotel Dan Restaoran Di Kabupaten Badung”, Kertha Patrika, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 36 No. 2, September 2011, Universitas Udayana.

I Gede Astra Wesnawa, 2009, “Perubahan Penerapan Konsep *Tri Hita Karana* Dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan (Kasus Kabupaten Badung Di Provinsi Bali), Disertasi, Ilmu Lingkungan UGM, Yogyakarta.

Ni Wayan Suarmini, 2008, “Peranan *Tri Hita Karana* Dalam Memperkuat Ketahanan Wilayah Di Desa Pakraman Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung-Bali”, Tesis, Prodi Ketahanan Nasional UGM, Yogyakarta.

Edi Susanto, 2008, “Tinjauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Yang Berwawasan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Daerah Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pemanfaatan Ruang Untuk Perumahan Dan Pemukiman Di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok), Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.

Bidang Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik, “Bali Dalam Angka 2014”, Katalog BPS 1102001.51, Penerbit : BPS Provinsi Bali.

D. INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, “Luas Wilayah dan Letak Geografis Pulau Bali dan Kabupaten/Kota Tahun 2013”, URL :

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=601001&od=51&id=51, diakses pada 12 Januari 2015.

BPS Kabupaten Badung, “Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Banjar dan Lingkungan menurut Kecamatan, Tahun 2013”, URL: <http://badungkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=119>, diakses pada 12 Januari 2015.

Bisnis Bali Online, “Pertumbuhan Ekonomi dan RTRW”, URL: <http://www.bisnisbali.com/2011/01/28/news/opini/nh.html> diakses pada 16 Juli 2014.

Babadbali, “Bisama Kesucian Pura”, URL: <http://www.babadbali.com/pura/bisama-kesucian-pura.htm>, diakses pada 16 Juli 2014.

BaleBengong.net, “Hentikan Mulia Resort dan Tolak BIP”, URL: <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2011/10/10/hentikan-mulia-resort-dan-tolak-bip.html>, diakses pada 2 Oktober 2014.

Himawan Estu Bagijo, “Pembentukan Peraturan Daerah”, URL : http://www.unicef.org/indonesia/id/29_Drafting_Provincial_Regulations_bahasa_.pdf, diakses pada 17 Agustus 2014.

I Wayan Gendo Suardana, “Urgensi Penegakan Perda RTRWP Bali”, URL : <http://gendovara.com/urgensi-penegakan-perda-rtrwp-bali/> , diakses pada 15 Juli 2014.

MUDP Bali, “Desa adat dalam UU Desa”, URL : <http://www.slideshare.net/DesaAdatBali/kajian-mudp-bali-terkait-uu-des> , diakses pada : 31 Januari 2015.

PenataanRuang.com, “Tujuan, Strategi dan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional”, URL: <http://www.penataanruang.com/tujuan.html> , diakses pada 2 Agustus 2014.

PenataanRuang.com, “Azas dan Tujuan Penataan Ruang”, URL: <http://www.penataanruang.com/azas-dan-tujuan.html> , diakses pada 2 Agustus 2014.

Tempo.co, “UU Desa Dinilai Ancam Otonomi Desa Adat di Bali”, URL :
<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/19/058608012/UU-Desa-Dinilai-Ancam-Otonomi-Desa-Adat-di-Bali>, diakses pada 31 Januari 2015.

The Jakarta Post, *Bali attracts 3.27 million foreign tourist in 2013*, URL :
<http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/24/bali-attracts-327-million-foreign-tourists-2013.html>, diakses pada 9 Juni 2014.

Denpost, “Teguran Kedua Baru Direspons”, URL :
<http://www.denpostnews.com/mangupura/teguran-kedua-baru-direspons-hotel-town-square-suite-mulai-bongkar-bangunan-melanggar.html>, diakses pada 29 April 2015.

Kabarnusa, “Pelanggaran Lemah, Banyak Pelanggaran Izin di Badung”, URL :
http://www.kabarnusa.com/2015/01/pengawasan-lemah-banyak-pelanggaran_24.html, diakses pada 29 April 2015.

Bisnis Bali, “Hotel Alila Seminyak Diduga Langgar Aturan Dan Tidak Memiliki Imb”, URL :
<http://bali.bisnis.com/read/20140516/9/44931/hotel-alila-seminyak-diduga-langgar-aturan-dan-tidak-memiliki-imb>, diakses pada 29 Mei 2015.